

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS TAMAN REKREASI ALAM MAYANG KOTA PEKANBARU)”

OLEH :

Winda Yulianti Masril

Email : Windayulianti93@gmail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani , M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Pekanbaru city is that the city will be minimal, especially tourism, nature tourism, and in spatial areas already run can be used as a place of tourism. Government Pekanbaru indeed less able to manage the tourist area and to achieve the tourist destination ahead does the government involves a third person in the management, one of which is a recreational park Alam Mayang in Pekanbaru, Recreation Alam Mayang is one of the natural attractions in the city of Pekanbaru in is owned by the private sector, and has a strategic location not far from downtown, but there are some issues that are not in accordance with local regulations in force in the city of Pekanbaru, one of which is abuse Recreation place this as a place sordid causing unrest of visitors and local residents and the lack of facilities available at this recreation area.

To analyze these problems the author uses the theory of Van Meter Van Horn which in accordance with these problems, Standard's policy objectives, resources, communication between organizations, implementing characteristics, economic and political environment. This research is a descriptive study with qualitative approach, where data collection techniques are observation and interviews with key informants as key informants.

It can be concluded that the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation 3 of 2002 on public entertainment (Case Study Recreation Park Alam Mayang In Pekanbaru City) have some problems so that this implementation is not effective because of the constraints faced by internally from them.

Keywords: Implementation, Department of Culture and Tourism, Recreation Alam Mayang

PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan kota bisnis , oleh karena itu menjadikan kota ini sedikit sekali mendapat perhatian dalam hal

kepariwisataan, selain itu masyarakat lebih suka memilih pusat perbelanjaan sebagai sarana tempat hiburan, padahal jika dijadikan tempat – tempat wisata

kemungkinan akan mendatangkan keuntungan bagi kota ini.

Kota Pekanbaru yang saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kota besar yang sedang mengalami berbagai pertumbuhan dan cenderung mengarah pada suasana metropolitan. Oleh sebab itu tatanan dan perilaku masyarakat kota pekanbaru senang terhadap hiburan, sebagai tempat untuk melepas stress dan pemerintah kota perlu untuk memfasilitasi tempat seperti.pada Kota Pekanbaru hal ini sudah diatur dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum.

Di Kota Pekanbaru banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang dikenal dengan hiburan umum yaitu semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pada pasal 3 tentang izin hiburan yang dapat diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh pemerintah kota dan instansi terkait. Pada hal ini saya tertarik untuk melakukan penelitian di Taman Rekreasi Alam Mayang di Kota Pekanbaru.

Taman rekreasi /taman pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan / hiburan untuk tempat rileks , santai serta menghilangkan stress dan pertunjukan untuk umum atau keluarga.

Pada peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburang umum pasal ke 4 yang menyatakan syarat dan ketentuan pada peraturan daerah ini adalah tidak

mengganggu ketenangan masyarakat atau lingkungan sekitar dan tidak menjadi tempat prostitusi

Namun pada kenyataannya banyak tempat hiburan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut, banyak tempat hiburan atau taman rekreasi yang pengelolaanya yang kurang baik, dan sering dikeluhkan oleh pengunjung, seperti banyak pengunjung yang mengeluhkan tentang kurang nyaman nya saat berada ditaman rekreasi karna banyak muda mudi yang menggunakannya sebagai tempat melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga membuat para pengunjung dan masyarakat sekitar resah dengan keadaan tersebut.

Permasalahan yang terjadi di Taman Rekreasi Alam Mayang ini juga terdapat dalam situs berita, salah satunya berita online Riau info yang mengatakan di Taman Rekreasi Alam Mayang ini banyak disalahgunakan oleh pasangan yang sedang dimabuk asmara dan menjadikan tempat ini sebagai tempat bermesraan sementara banyak orang yang datang dengan keluarga atau berkelompok berdatangan dan banyak yang membawa anak-anak sehingga mengakibatkan ketakutan bagi orang tua, banyak pegunjung yang menyayangkan hal seperti ini tidak ditindak lanjuti oleh pengelola Alam Mayang tersebut. Dan tidak ini saja masyarakat sekitar juga merasa resah bahwa Alam Mayang yang termasuk lingkungan nya malah menjadi tempat melakukan prostitusi.

Hal seperti ini sangat tidak selaras dengan keadaan kota pekanbaru yang merupakan pusat kebudayaan melayu yang bertatanan nilai budaya luhur masyarakat kota pekanbaru yang sangat baik, dalam mempertahankan , melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkan budya melayu yang berlandasan iman dan taqwa dan landasan spiritual , moral, norma dan etika.

kebutuhan makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh pengunjung.

Di tempat rekreasi Alam Mayang ini terdapat karyawan yang mengelola Taman rekreasi ini dan dari bagian-bagian diatas terdapat jumlah karyawan di Taman rekreasi Alam Mayang ini sejumlah 50 orang yang terdiri dari karyawan tetap di taman rekreasi Alam Mayang ini, namun terkadang terdapat juga siswa magang yang diletakkan di taman rekreasi alam mayang ini, sehingga dapat sedikit membantu pengelolaan taman rekreasi alam mayang ini. Dan pada saat ini terdapat 20 orang anak magang dari jurusan pariwisata. Para karyawan yang ada di taman rekreasi alam mayang ini biasanya mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000 dalam satu minggu, sehingga pendapatan para karyawan ini sekitar Rp. 1.200.00 dalam satu bulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Van Meter dan Van Horn dalam **Subarsono (2005:100)** mengemukakan ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi misi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- 2) Sumber daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia sumber daya non manusia.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas
Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama anatar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik Agen pelaksana
Agen pelaksana mencakup stuktur birokrasi, standard

operating procedure (SOP), norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Variable ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan.
- 6) Disposisi Implementor
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yaitu:
 - a) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan
 - c) Intensitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Pandangan Van Meter dan Van Horn diatas sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pendapat George C. Edwards III, dimana Van Meter dan Van Horn lebih menekankan pada lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut **Edward III** dalam **Winarno (2005:150)** terdapat dua karakteristik utama dari suatu birokrasi yaitu:

- a) SOP (Standar Operasional Prosedur)
Merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan akan penyeragaman dala organisasi kerja yang kompleks dan luas.
- b) Fragmentasi

Merupakan suatu penyebaran pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan dari tanggung jawab suatu kebijakan kepada badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut **Edward** dalam **Widodo (2011:96-110)** yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*) **Widodo (2011:97)**.

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakn itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi. Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan klebinggungan

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Hubungan dalam berkomunikasi dapat dilaksanakan dengan dua tipekomunikasi yaitu vertical dan horizontal. Sebagaimana di ungkapkan oleh **Karzt dan Kubu** dalam **Sujianto (2008:55)** yaitu sebagai berikut:

- a) Komunikasi ke bawah
 1. Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik dalam perintah kerja.
 2. Informasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungan dengan tugas-tugas organisasi rasional pekerjaan.
 3. Umpan balik kepada bawahan mengenai pekerjaannya.
 4. Informasi tentang suatu ciri ideologis untuk menanamkan rasa mengembangkan misi indoktrinasi-indoktrinasi mengenai tujuan-tujuan.
- b) Komunikasi ke atas

Komunikasi keatas merupakan informasi yang diminta oleh pihak manajemen dan informasi secara sukarela disampaikan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran informasi para pelaksana itu dapat berupa keluhan-keluhan mungkin juga gagasan inovatif.

- c) Komunikasi mendatar atau horizontal

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar merupakan kesepakatan yang telah di dokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksananya tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Seperti halnya proses implementasi yang dilakukan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Pekanbaru, menurut mereka proses implementasi telah mereka lakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada dan pihak pemerintah juga mengimbuai tempat-tempat hiburan untuk mengurus beberapa hal yang diperlukan seperti perizinan karena masih banyak tempat-tempat hiburan yang belum memiliki izin dan bila tidak dilakukan setelah diberi waktu untuk pengurusan maka usaha tempat hiburan tersebut akan dinyatakan batal demi hukum dan akan ditutup namun masih banyak tempat hiburan yang belum melakukan prosedur dengan baik walaupun sudah diperingatkan, seperti yang di paparkan pada wawancara berikut ini :

“ mengenai proses dari implementasi kebijakan ini sudah kita jalani sesuai dengan yang tertera pada Peraturan daerah, kita juga sudah melayani segala pengurusan dan kebutuhan yang dibutuhkan bagi tempat-tempat hiburan, tentunya harus dilengkapi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap instansi terkait”(**wawancara dengan Sarkawi S.pd, MM. kepala bidang Rekreasi dan Hiburan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 6 oktober 2015**)

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sumber daya yang merupakan sumber penggerak dan pelaksana kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi hitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam pengimplementasian Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ini, sumber daya manusia yang bekerja , dalam hal ini saya melihat sumber daya yang berada di Taman Rekreasi Alam Mayang ini.

“sumber daya manusia yang terdapat di Taman Rekreasi Alam Mayang ini terdapat beberapa bagian, mulai dari pengelola, koordinasi lapangan, bagian perawatan dan pengembangan, bagian pelayanan, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian makanan dan minuman. Dan pada saat ini juga terdapat beberapa siswa magang, dan pada hari-hari libur biasanya menambah pekerja lepas yang bekerja perhari di Taman rekreasi ini. (**wawancara dengan bapak Riyono koordinator lapangan Taman rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru, 26-27 September 2015**)

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik organisasi pelaksana yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. “kita sebagai bagian dari pemerintahan wajib memberi tau instansi-instansi terkait mengenai perizinan mereka, mereka mengurus perizinan di BPT namun rekomendasi tetap dari Dinas kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru dan kita juga melakukan beberapa sosialisai mengenai pengurusan perizinan mereka, kita share ke media masa, dan tidak hanya itu kita juga melakukan promosi atau pengenalan terhadap pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru tanpa terkecuali. ”(**wawancara dengan Sarkawi S.pd, MM. kepala bidang Rekreasi dan Hiburan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 6 oktober 2015**)

Dinas kebudayaan dan pariwisata bertugas sebagai tim

pemantau dalam hal hiburan umum di Kota Pekanbaru, Dinas juga melakukan himbauan-himbauan melalui surat untuk mengurus perizinan mereka dan juga memudahkannya dengan melakukan sosialisasi lewat media masa dan demi majunya pariwisata di Kota Pekanbaru pemerintah juga melakukan pengenalan dan promosi lewat media masa.

4. Sikap Para Pelaksana.

Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan –kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

“Saya memang tidak tahu kemana saya ingin menyampaikan keresahan yang saya rasakan dalam berwisata ini, mungkin hanya kepada pihak pengelola saja”(wawancara dengan bapak irwan pengunjung Taman Rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru, 26 September 2015)

Dari wawancara diatas dengan pengunjung Taman Rekreasi Alam Mayang, ada beberapa pengunjung yang memang sangat peduli dan merasa resah dan merasakan kurangnya fasilitas, namun mereka tidak mengetahui kemana ingin melaporkan keluhan ini, apakah kepada pengelola atau ada pihak lainnya yang juga berwenang dalam hal tersebut.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Dalam pengimplementasian sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi dan

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator sebagai penyampaian kebijakan kepada komunikan yang bersifat sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dilakukan dengan baik.

“kita sebagai masyarakat sekitar juga berharap diberi pemberitahuan mencakup lingkungan sekitar dan letak Taman Rekreasi ini juga di daerah tempat tinggal kita, sehingga juga menjadi pertanggung jawaban warga sekitar apabila terjadi hal-hal yang juga ikut meresahkan ketenangan warga sekitar” .(wawancara dengan bapak Mukhlis warga di sekitar Taman Rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru, 29 September 2015)

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

”memang masalah lingkungan menjadi salah satu masalah, tempat rekreasi ini sangat luas sementara terdapat banyak pengunjung dari berbagai kalangan, apabila sudah ada salah satu orang memulai melakukan kesalahan / perbuatan sperti yang dilakukan anak muda pada zaman sekarang, dan mereka merasa aman maka akan banyak pengikutnya. (wawancara dengan Bapak Nofriyanto pengunjung Taman Rekreasi

Alam Mayang Kota Pekanbaru, 26 September 2015)

“ sebenarnya hal ini sudah kita himbaukan kepada pihak taman rekreasi, karna hal-hal yang menjadi larangan tersebut kadang menjadi tontonan warga sekitar sehingga menimbulkan dampak negative untuk masyarakat sekitar, tapi mungkin karna berbagai faktor dan taman rekreasi ini sangat luas makanya tidak bisa diatasi secara maksimal. (wawancara dengan bapak Mukhlis warga sekitar Taman rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru, 29 September 2015)

Dari wawancara diatas dapat dilihat terdapat beberapa masalah mulai dari lingkungan yang mulai melakukan penyalahgunaan yang dilakukan anak muda di Taman Rekreasi Alam Mayang melakukan hal-hal yang dilarang seperti pacaran dan melakukan hal yang tidak seronok di tempat umum dan tidak ada tindakan serius dari pihak pengelola Taman Rekreasi Alam Mayang ini,

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum belum terlaksana dengan optimal, dan pihak pemerintahan belum ada penyampaian kebijakan secara optimal kepada Taman Rekreasi Alam Mayang di Kota Pekanbaru sehingga pengelola Taman Rekreasi Alam Mayang ini hanya sekedar memahami kebijakan saja, petugas yang memantau dari dinas pun sangat jarang sehingga mengakibatkan implementasi ini tidak terlaksana dengan baik.
2. Fakto-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

- a. Komunikasi yang terjalin antara actor-aktor pemerintahan yang terlibat tentang Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ini belum maksimal kurangnya kerja sama yang dibangun pihak Taman Rekreasi Alam Mayang ini kepada pihak pemerintah dan masyarakat sekitar mengakibatkan dampak buruk terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah ini.
- b. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat mengenai keijakan ini juga tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan ketidak pahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas Kebudayaan dan pariwisata juga sangat terbatas sehingga menyebabkan kesulitan untuk melakukan pembinaan dan pengecekan . sumber daya manusia yang dimiliki oleh Taman Rekreasi Alam Mayang juga sangat kurang sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak Taman Rekreasi ini terhadap pengunjung yang melakukan tindakan yang tidak wajar dilakukan di Taman Rekreasi ini, untuk merawat dan penyediaan fasilitas lainnya juga mengalami kekurangan.
- d. Peran masing-masing pihak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ini sangat diperlukan baik dari pihak pemerintahan, tempat wisata maupun masyarakat-masyarakat sekitar. Namun dalam pengimplementasian peraturan daerah ini kesadaran diri para pelaksana kebijakan sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kebijakan yang dijelaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Meleong, J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Resdokarya
- Pasalong, Harbani, 2011, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Putra, Fadillah, 2005, *Kebijakan Publik Budak Untuk Publik*. Yogyakarta : CV. Langit Aksara
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyan Ratih, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Said Zainal. Abidin. 2012 *Kebijakan Publik* . Jakarta : Yayasan Pancur Indah
- Samodra, dkk, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Subarsono. 2005, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, Teori dan Aplikasi)* Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Widodo, Joko, 2007, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing
- _____, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, proses dan studi Kasus)* Yogyakarta : CAPS